

TANTANGAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL DALAM RUU RPJPN

21

Sali Susiana*

Abstrak

Transformasi Sosial merupakan salah satu misi dari 17 Arah (Tujuan) Pembangunan yang terdapat dalam RPJPN 2025-2045. Tiga bidang dalam Transformasi Sosial yaitu: (1) kesehatan untuk semua; (2) pendidikan berkualitas yang merata; dan (3) perlindungan sosial yang adaptif. Tema Hari Ibu tahun ini, yaitu "Perempuan Berdaya, Indonesia Maju", sangat relevan dengan Transformasi Sosial, karena menyangkut kehidupan perempuan secara langsung, terutama bidang kesehatan dan pendidikan. Tulisan ini membahas tantangan pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan Transformasi Sosial dalam RUU RPJPN yang dilihat dari dua bidang, yaitu kesehatan dan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa di bidang kesehatan, angka kematian ibu masih tinggi. Di bidang pendidikan, angka melek huruf perempuan masih rendah. Selain itu, masih terdapat kesenjangan gender dalam bidang STEM (Science, Technology, Engineering, dan Mathematics). DPR RI melalui fungsi legislasi berperan penting dalam memastikan agar isu krusial yang dihadapi perempuan dalam bidang kesehatan dan pendidikan menjadi fokus perhatian dalam pembahasan RUU RPJPN mendatang.

Pendahuluan

Berdasarkan Rapat Panja Evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023 dan Jangka Menengah 2020-2024 pada 22 Agustus 2023, Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

(RUU RPJPN) merupakan salah satu RUU yang masuk ke dalam Prolegnas RUU Perubahan Prioritas Tahun 2023 (DPR RI, 2023; Aditya dan Santosa, 2023). Hingga saat ini, RUU RPJPN belum dimulai pembahasannya.

Dalam RUU RPJPN, dicantumkan Visi Indonesia Emas



* Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesra pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-mail: sali.susiana@dpr.go.id.



2045 sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode RPJPN (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan upaya transformatif yang mencakup aspek sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Visi Indonesia Emas 2045 akan diwujudkan antara lain melalui Transformasi Sosial (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Transformasi Sosial merupakan misi ke-1 dari 17 Arah (Tujuan) Pembangunan yang terdapat dalam RPJPN 2025-2045. Transformasi Sosial lebih lanjut dijabarkan ke dalam tiga bidang, yaitu: (1) kesehatan untuk semua; (2) pendidikan berkualitas yang merata; dan (3) perlindungan sosial yang adaptif.

Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali bagaimana kondisi perempuan Indonesia saat ini. Tema Hari Ibu yang ke-95 tahun ini, yaitu "Perempuan Berdaya, Indonesia Maju" (detik.com, 29 November 2023). Terkait dengan hal itu, dua bidang dalam Transformasi Sosial, yaitu kesehatan dan pendidikan, sangat relevan dengan tema tersebut, karena menyangkut kehidupan perempuan secara langsung. Tulisan ini membahas tantangan pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan Transformasi Sosial dalam RUU RPJPN dilihat dari dua bidang, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Transformasi Sosial dalam RUU RPJPN

Dalam Lampiran RUU RPJPN dinyatakan bahwa Transformasi Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada

seluruh siklus hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Transformasi Sosial lebih lanjut dijabarkan dalam lima Upaya Super Prioritas (*Game Changers*), antara lain: (1) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); dan (2) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) berkualitas, termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

Selain itu, terdapat beberapa indikator capaian Transformasi Sosial. Salah satu indikator bidang kesehatan yaitu angka kematian ibu (AKI). Sedangkan indikator bidang pendidikan antara lain rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, harapan lama sekolah, angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Tinggi, serta persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi (Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

Dari lima Upaya Super Prioritas serta berbagai indikator bidang kesehatan dan pendidikan, terdapat beberapa indikator yang berkaitan langsung dengan perempuan, seperti AKI, rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, harapan lama sekolah, APK pendidikan tinggi, serta persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Tantangan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan

Agar dapat mewujudkan Transformasi Sosial di bidang kesehatan

dan pendidikan, perlu diketahui apa saja permasalahan atau tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan dalam dua bidang tersebut. *Pertama*, dalam Lampiran RUU RPJPN, bidang kesehatan diarahkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua penduduk. Perempuan sebagai bagian dari penduduk oleh karenanya juga memiliki hak atas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Salah satu permasalahan di bidang kesehatan yang masih dihadapi oleh perempuan Indonesia hingga saat ini yaitu AKI. Selain sebagai salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan, AKI juga menjadi salah satu komponen indeks pembangunan dan indeks kualitas hidup. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, AKI tercatat sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (BPS, 2007). Selanjutnya berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015, AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (BPS, 2015). Adapun berdasarkan *Human Development Report*, AKI Indonesia adalah sebesar 126 per 100.000 kelahiran hidup (Kementerian PPPA dan BPS, 2019).

Data mutakhir tentang AKI belum tersedia karena pengumpulan data AKI yang bersumber dari Sensus Penduduk 2020 ditunda pelaksanaannya akibat pandemi Covid-19. Berbagai data tentang AKI tersebut masih sangat jauh dari target *Roadmap Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia sebesar 131 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (ARR 5%) dan target SDGs sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Untuk

menekan AKI, seluruh pemangku kepentingan terkait perlu bergerak dan bersinergi, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta para pemangku kepentingan di daerah, termasuk organisasi perangkat daerah yang membidangi kesehatan dan pemberdayaan perempuan.

Kedua, dalam Lampiran RUU RPJPN, pendidikan diarahkan untuk memberikan pendidikan berkualitas yang merata, inklusif, dan adaptif, dengan peningkatan dalam pengajaran, pembelajaran berbasis digital, dan partisipasi dalam pendidikan tinggi. Sementara itu, dari lima Upaya Super Prioritas dalam bidang pendidikan, dua di antaranya terkait erat dengan perempuan, yaitu: (1) percepatan wajib belajar 13 tahun; dan (2) peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas.

Di bidang pendidikan, saat ini masih terdapat kesenjangan capaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang antara lain dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH). AMH merupakan salah satu indikator yang menjadi target SDGs pada pilar Sosial, yaitu target 4.6. dengan target pada tahun 2030 menjamin semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020 menunjukkan bahwa secara nasional, AMH penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas tahun 2020 sebesar 94,55%, lebih rendah 2,9% dibandingkan dengan AMH laki-laki sebesar 97,45% (BPS, 2020). Sebaliknya, bila dilihat dari angka buta huruf, hingga saat ini persentase

penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas yang buta huruf masih sebesar 4,74%, lebih tinggi hampir dua kali lipat daripada angka buta huruf laki-laki yang sebesar 2,58% (BPS, 2023). Untuk mengatasi rendahnya AMH, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (untuk sekolah negeri) dan Kementerian Agama (untuk sekolah agama) perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan AMH.

Permasalahan lainnya adalah adanya kesenjangan gender dalam bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*). Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 menunjukkan persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah pendidikan tinggi di bidang STEM sebesar 33,91%. Persentase tersebut lebih tinggi sebesar 4,5% dibandingkan dengan perempuan yang sebesar 29,41% (BPS, 2020). Angka ini sedikit di atas angka STEM internasional yang sebesar 26% (stemwomen.com, 22 Juni 2022).

Diperlukan upaya dari seluruh pemangku kepentingan terkait, terutama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi agar perempuan tertarik memasuki dunia STEM sehingga kesenjangan gender di bidang STEM semakin berkurang, terutama melalui pemberian beasiswa kepada siswa perempuan yang tertarik menekuni STEM dan meminta sekolah/perguruan tinggi/institusi lainnya untuk mengambil kebijakan khusus/*affirmative action* agar siswa/mahasiswa perempuan semakin tertarik memilih jurusan STEM. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga dapat bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengampunayakan pentingnya

perempuan terjun ke bidang STEM kepada siswa/mahasiswa di sekolah dan perguruan tinggi.

Penutup

Untuk mewujudkan Transformasi Sosial dalam RUU RPJPN dalam bidang pendidikan dan kesehatan, permasalahan atau tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan dalam dua bidang tersebut hingga saat ini harus diatasi. Di bidang kesehatan, AKI masih tinggi. Di bidang pendidikan, AMH perempuan masih rendah. Selain itu, masih terdapat kesenjangan gender dalam bidang STEM. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, seluruh pemangku kepentingan terkait perlu bergerak dan bersinergi, baik kementerian/lembaga di tingkat pusat, maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

DPR RI melalui fungsi legislasi juga berperan penting dalam memastikan agar isu krusial yang dihadapi perempuan dalam bidang kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu fokus perhatian dalam pembahasan RUU RPJPN mendatang. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi X, sesuai dengan bidang tugas masing-masing, juga perlu menjadikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di bidang kesehatan dan pendidikan ini sebagai salah satu fokus pengawasan.

Referensi

Aditya, Nicholas Ryan dan Bagus Santosa. 2023. "DPR Tetapkan 42 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023", *kompas.com*, 29 Agustus 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/29/15433751/dpr-tetapkan-42-ruu-masuk-prolegnas-prioritas-2023>, diakses 10 Desember 2023.

- Badan Pusat Statistik. 2007. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Buana, Eka Chandra. 2023. *Kementerian PPN/Bappenas. Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dalam Perspektif Pembangunan Daerah*. Makalah dipresentasikan dalam FGD tentang Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dalam Perspektif Pembangunan Daerah, Universitas La Tansa Mashiro, Lebak, Banten, 28 November 2023.
- DPR RI. 2023. Program Legislasi Nasional Prioritas, <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, diakses 10 Desember 2023.
- “Hari Ibu 2023: Tema Resmi dan Sejarah Singkatnya”, detik.com, 29 November 2023, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7061895/hari-ibu-2023-tema-resmi-dan-sejarah-singkatnya>, diakses 10 Desember 2023.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Badan Pusat Statistik. 2019. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2019*.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2023. *Lampiran Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2023. *Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*.
- “Women in STEM Statistics”, stemwomen.com, 22 Juni 2022, <https://www.stemwomen.com/women-in-stem-percentages-of-women-in-stem-statistics>, diakses 17 Desember 2023.